

# Sertifikasi CHSE sebagai Fondasi Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Efektivitas dan Peta Jalan Menuju Sertifikasi Hijau Global di Indonesia

Muhammad Rahmad<sup>1</sup>, Almira Rahmadhani Buana<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Institut Pariwisata Trisakti

[muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id](mailto:muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id) ; [almira.rahmadhani@student.stptrisakti.ac.id](mailto:almira.rahmadhani@student.stptrisakti.ac.id)

## Abstrak

Sektor pariwisata Indonesia menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan praktik keberlanjutan di tengah meningkatnya kesadaran global akan isu lingkungan. Sebagai respons, pemerintah memperkenalkan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* (CHSE) sebagai bagian integral dari strategi pemulihan pascapandemi COVID-19 (Putro, 2024). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sertifikasi CHSE sebagai fondasi awal menuju pariwisata berkelanjutan, mengevaluasi efektivitasnya, serta mengidentifikasi kesenjangan antara standar CHSE dan sertifikasi hijau global yang lebih komprehensif. Melalui pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur sistematis, penelitian ini menunjukkan bahwa CHSE telah berhasil membangun kembali kepercayaan konsumen dan mendorong kesadaran awal akan pentingnya aspek lingkungan dalam operasional pariwisata (Jurnal Unived, 2025; Salsabila, 2023). Namun, ditemukan bahwa komponen keberlanjutan lingkungan dalam CHSE sering kali bersifat minimal karena fokus utamanya pada protokol kesehatan dan keselamatan (Andini, 2024). Hambatan utama dalam adopsi sertifikasi yang lebih tinggi meliputi biaya implementasi, kurangnya pengetahuan, dan komitmen manajemen yang belum kuat (Haldorai et al., 2022). Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara pemerintah, asosiasi industri, dan pelaku pariwisata untuk mendorong transisi ke sertifikasi hijau global seperti *Green Key* atau *Green Globe* sebagai investasi strategis jangka panjang.

**Kata Kunci:** *pariwisata berkelanjutan; sertifikasi CHSE; sertifikasi hijau global; daya saing pariwisata; Indonesia*

## 1. Pendahuluan

Sektor pariwisata global telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan meningkatnya kesadaran akan isu keberlanjutan dan lingkungan. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan kerusakan ekosistem telah mendorong konsumen dan pemangku kepentingan untuk menuntut praktik yang lebih bertanggung jawab dari industri ini. Dalam konteks ini, konsep pariwisata berkelanjutan—yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial-budaya—telah menjadi fokus utama (Haldorai et al., 2022). Pergeseran ini tidak hanya didorong oleh aktivisme lingkungan, tetapi juga oleh perubahan perilaku pasar, di mana konsumen semakin memilih produk dan layanan yang memiliki sertifikasi atau reputasi ramah lingkungan (Rangkuti, 2023; Wijaya, 2022).

Di Indonesia, respons terhadap tuntutan ini diakselerasi oleh pandemi COVID-19. Meskipun pandemi menimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi yang parah, peristiwa tersebut juga memicu refleksi mendalam tentang masa depan pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan resilien. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memperkenalkan sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*

(CHSE) sebagai bagian dari strategi pemulihan pascapandemi. Putro (2024) menyoroti bahwa strategi pemulihan ekonomi pascapandemi di Indonesia, termasuk sertifikasi CHSE, menjadi kunci untuk mengembalikan sektor pariwisata ke jalurnya. Oleh karena itu, CHSE tidak hanya menjadi alat untuk mengatasi krisis sesaat, tetapi juga fondasi awal bagi transisi menuju pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Namun, pertanyaan kritis muncul mengenai sejauh mana sertifikasi CHSE benar-benar efektif dalam mendorong transformasi pariwisata yang berkelanjutan secara komprehensif. Andini (2024) mengindikasikan bahwa CHSE memiliki keterbatasan dalam mencakup aspek-aspek keberlanjutan yang lebih luas, seperti manajemen rantai pasok hijau dan tanggung jawab sosial korporat. Sementara itu, sertifikasi hijau global seperti *Green Key* dan *Green Globe* menawarkan kerangka kerja yang jauh lebih holistik, yang diperlukan untuk bersaing di pasar internasional yang semakin sadar lingkungan (Wijaya, 2022; Lestari & Purnomo, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis peran dan implementasi sertifikasi CHSE dalam mendorong keberlanjutan di sektor hotel dan operator wisata; (2) mengevaluasi efektivitas sertifikasi CHSE dalam mendorong praktik ramah lingkungan serta mengidentifikasi kesenjangan dengan standar global; dan (3) mengkaji strategi adopsi sertifikasi hijau yang lebih komprehensif sebagai upaya meningkatkan daya saing global sektor pariwisata Indonesia.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Kerangka Konseptual Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan didefinisikan sebagai pengembangan pariwisata yang memperhatikan kebutuhan wisatawan saat ini dan komunitas tuan rumah, sekaligus melindungi dan meningkatkan peluang masa depan (Wijaya, 2022). Dalam konteks industri perhotelan dan jasa perjalanan, keberlanjutan mencakup tiga dimensi yang saling berkaitan: dimensi lingkungan (pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi, dan konservasi biodiversitas), dimensi ekonomi (profitabilitas jangka panjang dan distribusi manfaat yang merata), serta dimensi sosial-budaya (pelestarian warisan budaya lokal dan pemberdayaan komunitas) (Andini, 2024).

Haldorai et al. (2022) dalam kajian mereka tentang komitmen manajemen puncak dan modal intelektual hijau sebagai pendorong kinerja lingkungan perhotelan menegaskan bahwa keberlanjutan dalam industri pariwisata bukan sekadar pilihan etis, melainkan imperatif bisnis yang didorong oleh tekanan konsumen, regulasi, dan persaingan pasar. Yusoff et al. (2020) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia yang berorientasi hijau secara signifikan meningkatkan kinerja lingkungan hotel, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan loyalitas pelanggan.

### 2.2 Sertifikasi sebagai Instrumen Keberlanjutan Pariwisata

Sertifikasi merupakan salah satu instrumen kebijakan yang paling efektif dalam mendorong adopsi praktik berkelanjutan di industri pariwisata. Wijaya (2022) mengidentifikasi tiga fungsi utama sertifikasi: sebagai sinyal kualitas bagi konsumen yang memungkinkan diferensiasi produk di pasar, sebagai kerangka kerja perbaikan internal yang mendorong inovasi operasional, dan sebagai mekanisme akuntabilitas publik yang mencegah *greenwashing*.

Rangkuti (2023) dalam penelitiannya tentang strategi hotel hijau menemukan bahwa sertifikasi ramah lingkungan memiliki dampak positif yang signifikan pada loyalitas pelanggan dan niat pembelian kembali, menunjukkan bahwa konsumen global semakin menghargai komitmen lingkungan yang terverifikasi.

Sertifikasi hijau global seperti *Green Key* dan *Green Globe* memiliki karakteristik yang membedakannya dari sertifikasi nasional: standar yang dikembangkan melalui konsultasi multipemangku kepentingan internasional, proses audit pihak ketiga yang independen dan ketat, pengukuran kinerja yang terukur dan dapat dibandingkan antarlokasi, serta persyaratan pelaporan yang transparan (Wijaya, 2022). Karakteristik-karakteristik ini menjadikan sertifikasi hijau global sebagai alat yang lebih kuat dalam membangun kepercayaan konsumen internasional dan membuka akses ke segmen pasar wisatawan yang sadar lingkungan.

### **2.3 Manajemen Rantai Pasok Hijau dalam Pariwisata**

Yu et al. (2020) dalam kajian mereka tentang dampak modal relasional terhadap manajemen rantai pasok hijau dan kinerja finansial menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata yang sejati tidak dapat dicapai hanya melalui perubahan operasional internal, tetapi harus mencakup transformasi seluruh rantai nilai. Manajemen rantai pasok hijau (*green supply chain management*) mensyaratkan bahwa pelaku pariwisata tidak hanya menerapkan praktik ramah lingkungan dalam operasinya sendiri, tetapi juga memilih mitra dan pemasok berdasarkan kriteria keberlanjutan yang terstandarisasi. Keterbatasan sertifikasi CHSE dalam mendorong transformasi rantai pasok ini menjadi salah satu celah kritis yang perlu diatasi melalui adopsi standar yang lebih komprehensif.

## **3. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Sumber data mencakup sepuluh jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang relevan dengan tema sertifikasi CHSE, sertifikasi hijau global, dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Kriteria pemilihan literatur meliputi: relevansi tematik yang tinggi, diterbitkan dalam kurun waktu 2020–2025, tersedia dalam bentuk naskah lengkap, dan diterbitkan dalam jurnal atau prosiding yang memiliki proses seleksi ilmiah yang memadai. Data dianalisis melalui pendekatan tematik dengan kategorisasi ke dalam lima tema utama: standar dan komponen CHSE, dampak terhadap kepercayaan konsumen, keterbatasan dan kesenjangan dengan standar global, model sertifikasi hijau global, serta strategi adopsi dan hambatan implementasi.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Standar dan Komponen Sertifikasi CHSE**

Sertifikasi CHSE diperkenalkan sebagai program sertifikasi yang mencakup empat pilar utama: *Cleanliness* (kebersihan), *Health* (kesehatan), *Safety* (keselamatan), dan *Environmental Sustainability* (keberlanjutan lingkungan). Keberadaan pilar keempat ini menandai sebuah pergeseran paradigma yang signifikan, di mana isu lingkungan mulai diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari kualitas layanan pariwisata, bukan sekadar pertimbangan sekunder (Putro, 2024; Jurnal Unived, 2025). Ini merupakan indikator bahwa pemerintah menyadari pentingnya

tidak hanya memulihkan sektor pariwisata dari dampak pandemi, tetapi juga membangunnya kembali di atas fondasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Salsabila (2023) dalam penelitiannya tentang implementasi CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort menjelaskan bahwa standar keberlanjutan dalam CHSE mendorong berbagai praktik konkret, termasuk efisiensi energi melalui penggunaan lampu hemat energi, pengelolaan limbah yang lebih baik melalui pemilahan sampah dan pengurangan plastik sekali pakai, serta penggunaan air secara bijaksana melalui instalasi perangkat hemat air. Elemen-elemen ini memaksa pelaku usaha pariwisata untuk mulai berpikir tentang jejak ekologis mereka dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meminimalkannya.

Penting untuk dipahami bahwa sertifikasi CHSE berfungsi sebagai semacam "sekolah pertama" bagi industri pariwisata Indonesia dalam menginternalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan. Praktik-praktik dasar yang didorong oleh CHSE—seperti penggunaan produk ramah lingkungan, pengurangan sampah plastik, dan konservasi air—menjadi titik masuk bagi banyak bisnis pariwisata untuk memulai perjalanan keberlanjutan mereka (Salsabila, 2023). Penerapan standar ini juga menciptakan efek domino dalam rantai pasok: ketika sebuah hotel mulai mengurangi penggunaan plastik, misalnya, mereka akan mencari pemasok yang menyediakan alternatif ramah lingkungan, yang pada gilirannya mendorong seluruh rantai pasok pariwisata untuk berinovasi (Yu et al., 2020). Kesadaran kolektif yang dibangun melalui proses ini merupakan modal berharga untuk transisi ke standar yang lebih komprehensif di masa depan.

#### **4.2 Dampak Sertifikasi CHSE terhadap Kepercayaan Konsumen dan Kinerja Lingkungan**

Dampak paling nyata dari sertifikasi CHSE adalah kemampuannya dalam membangun kembali kepercayaan konsumen pascapandemi. Sertifikasi ini memberikan jaminan visual dan operasional bahwa suatu tempat telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ketat, yang sangat dibutuhkan wisatawan dalam konteks ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi (Jurnal Unived, 2025; Putro, 2024). Kepercayaan konsumen ini tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan; seiring waktu, adanya elemen keberlanjutan lingkungan juga mulai membentuk citra positif bagi destinasi yang bersertifikat di mata wisatawan yang semakin sadar lingkungan.

Namun, pertanyaan kritis muncul mengenai sejauh mana CHSE benar-benar mendorong perubahan signifikan dalam praktik lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang dihasilkan cenderung terbatas pada aspek-aspek yang mudah diimplementasikan, seperti efisiensi energi dasar dan pengelolaan sampah sederhana, tanpa menyentuh aspek yang lebih kompleks dan transformasional seperti pengelolaan limbah cair, pengurangan jejak karbon secara komprehensif, atau investasi dalam energi terbarukan (Andini, 2024). Implementasi CHSE lebih banyak berfokus pada kepatuhan minimum daripada transformasi total.

Hal ini menimbulkan risiko tertentu: pelaku industri dapat merasa cukup dengan standar CHSE dan mengabaikan kebutuhan untuk beralih ke sertifikasi yang lebih ketat. Lebih jauh, fokus dominan pada aspek *health and safety* berisiko menyamarkan pentingnya aspek lingkungan dalam benak pemangku kepentingan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa standar

keberlanjutan sudah terpenuhi padahal sebenarnya masih berada di tingkat yang sangat minimal (Salsabila, 2023). Dengan demikian, CHSE berfungsi sebagai jembatan yang penting, tetapi jembatan tersebut harus dilalui—bukan menjadi tujuan akhir—untuk mencapai pariwisata yang benar-benar berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Yusoff et al. (2020) memberikan perspektif yang berharga mengenai dimensi sumber daya manusia dalam keberlanjutan pariwisata. Praktik manajemen sumber daya manusia yang berorientasi hijau, termasuk pelatihan kesadaran lingkungan, sistem insentif untuk perilaku ramah lingkungan, dan rekrutmen berbasis nilai keberlanjutan, terbukti menjadi pendorong kinerja lingkungan yang lebih efektif dibandingkan sekadar kepatuhan terhadap standar sertifikasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas jangka panjang CHSE sangat bergantung pada internalisasi nilai keberlanjutan di seluruh lapisan organisasi, bukan hanya pada tingkat manajemen puncak.

### **4.3 Keterbatasan CHSE dan Kebutuhan Transformasi**

Meskipun memiliki peran penting, sertifikasi CHSE memiliki keterbatasan mendasar yang perlu diakui secara jujur. Andini (2024) menyoroti bahwa CHSE belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek keberlanjutan yang lebih luas, seperti manajemen rantai pasok hijau yang melibatkan pemilihan pemasok berdasarkan kriteria lingkungan dan sosial, serta tanggung jawab sosial korporat yang meliputi dukungan terhadap komunitas lokal dan pelestarian budaya.

Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara praktik pariwisata yang didorong oleh CHSE dan pariwisata berkelanjutan yang sejati. Kesenjangan tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa dimensi. Pertama, dari segi kedalaman: standar CHSE tidak mensyaratkan audit lingkungan yang komprehensif, pengukuran jejak karbon yang sistematis, atau pelaporan keberlanjutan yang transparan sebagaimana diwajibkan oleh sertifikasi global (Wijaya, 2022). Kedua, dari segi cakupan: CHSE tidak mencakup aspek-aspek seperti desain bangunan yang ramah lingkungan, investasi dalam energi terbarukan, atau program keterlibatan komunitas yang bermakna (Andini, 2024). Ketiga, dari segi verifikasi: berbeda dengan sertifikasi global yang menggunakan audit pihak ketiga yang independen, proses verifikasi CHSE lebih rentan terhadap inkonsistensi dan *greenwashing*.

Haldorai et al. (2022) dalam kajian mereka tentang komitmen manajemen puncak sebagai pendorong kinerja lingkungan menegaskan bahwa tanpa komitmen yang kuat dari manajemen puncak yang didorong oleh standar yang lebih menuntut, peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan sulit untuk dicapai. Sementara itu, Yu et al. (2020) menekankan bahwa modal relasional yang kuat dengan mitra rantai pasok yang bertanggung jawab merupakan prasyarat yang seringkali menjadi kendala besar dalam implementasi praktik berkelanjutan yang komprehensif. Keterbatasan CHSE dalam kedua aspek ini menjadikan transisi ke standar yang lebih ketat sebagai keharusan strategis, bukan sekadar pilihan.

### **4.4 Model Sertifikasi Hijau Global dan Relevansinya bagi Indonesia**

Untuk meningkatkan standar dan daya saing pariwisata Indonesia di pasar internasional, industri perlu mempelajari dan secara bertahap mengadopsi model sertifikasi hijau global. Wijaya (2022) menegaskan bahwa sertifikasi pariwisata berkelanjutan memainkan peran

krusial dalam meningkatkan daya saing destinasi, dengan sertifikasi global yang diakui secara internasional berfungsi sebagai bukti komitmen yang dapat dipercaya oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia.

*Green Key*, sebagai salah satu sertifikasi lingkungan terkemuka di sektor pariwisata, menerapkan kriteria yang jauh lebih komprehensif dibandingkan CHSE. Kriteria ini mencakup efisiensi energi dan pengelolaan air yang terukur dengan target yang jelas, audit limbah secara berkala, penggunaan bahan kimia ramah lingkungan, pengembangan program edukasi keberlanjutan bagi staf, dan komunikasi aktif dengan tamu mengenai praktik lingkungan (Rangkuti, 2023). Demikian pula, *Green Globe* mensyaratkan pengukuran kinerja lingkungan yang terstandarisasi secara internasional dan memungkinkan benchmarking dengan hotel-hotel di seluruh dunia.

Rangkuti (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa sertifikasi ramah lingkungan memiliki dampak positif yang signifikan pada loyalitas pelanggan dan niat pembelian kembali. Temuan ini mengindikasikan bahwa konsumen global—khususnya segmen wisatawan yang sadar lingkungan (*eco-conscious travelers*)—semakin menjadikan sertifikasi hijau sebagai kriteria penting dalam pengambilan keputusan wisata mereka. Lestari dan Purnomo (2023) lebih lanjut menunjukkan bahwa hotel dengan sertifikasi hijau di Indonesia cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang, memberikan bukti empiris yang kuat bahwa investasi dalam keberlanjutan adalah aset strategis, bukan sekadar biaya tambahan.

Adopsi standar global juga memberikan manfaat konkret dalam hal efisiensi operasional. Pengurangan konsumsi energi dan air yang didorong oleh standar yang lebih ketat tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat secara signifikan menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. Investasi awal dalam teknologi dan pelatihan sering kali terbayar kembali melalui penghematan ini, menjadikan adopsi sertifikasi hijau global sebagai langkah bisnis yang cerdas sekaligus bertanggung jawab secara ekologis (Lestari & Purnomo, 2023). Selain itu, sertifikasi ini dapat menjadi jembatan untuk terhubung dengan rantai pasok global yang semakin menuntut transparansi dan praktik yang bertanggung jawab dari seluruh mitranya (Yu et al., 2020).

#### **4.5 Strategi Adopsi dan Hambatan Implementasi**

Meskipun manfaat adopsi sertifikasi hijau global sudah cukup jelas, perjalanan menuju standar yang lebih komprehensif tidak bebas dari hambatan. Haldorai et al. (2022) mengidentifikasi tiga hambatan utama: biaya implementasi yang tinggi—terutama untuk investasi dalam infrastruktur dan teknologi yang diperlukan—kurangnya pengetahuan dan kapasitas teknis tentang standar yang diperlukan, serta komitmen manajemen yang belum kuat karena orientasi bisnis jangka pendek yang masih dominan. Banyak pelaku usaha, terutama yang berskala kecil dan menengah, cenderung memandang investasi dalam sertifikasi hijau sebagai biaya tambahan yang tidak memberikan keuntungan finansial langsung, sehingga kurang memiliki motivasi untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan.

Yu et al. (2020) menambahkan dimensi penting: kurangnya modal relasional—yaitu jaringan hubungan yang kuat dengan pemasok yang bertanggung jawab dan mitra strategis yang berkomitmen terhadap keberlanjutan—seringkali menjadi kendala struktural yang

menghambat implementasi manajemen rantai pasok hijau. Tanpa ekosistem bisnis yang mendukung praktik berkelanjutan di seluruh rantai nilai, upaya individual pelaku pariwisata akan terbatas dampaknya.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan pendekatan strategis yang terkoordinasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pertama, dukungan kebijakan yang konkret: pemerintah dapat memberikan insentif finansial berupa subsidi sertifikasi, keringanan pajak, atau akses ke pembiayaan berbunga rendah bagi perusahaan yang mengadopsi sertifikasi hijau global. Insentif ini secara signifikan dapat mengurangi beban finansial dan membuat transisi menjadi lebih layak secara ekonomis, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (Andini, 2024).

Kedua, pembangunan kapasitas dan literasi keberlanjutan: kolaborasi antarpelaku industri melalui asosiasi pariwisata dapat menciptakan platform yang efektif untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Andini (2024) menekankan pentingnya peningkatan literasi dan pendidikan tentang keberlanjutan di kalangan pelaku pariwisata, termasuk pemahaman tentang manfaat finansial jangka panjang dari investasi keberlanjutan. Yusoff et al. (2020) menambahkan bahwa program pelatihan yang komprehensif untuk staf di semua tingkatan merupakan investasi yang memberikan imbal hasil yang signifikan dalam bentuk peningkatan kinerja lingkungan yang berkelanjutan.

Ketiga, komunikasi manfaat bisnis yang berbasis bukti: Lestari dan Purnomo (2023) menyediakan argumen yang sangat persuasif dengan menunjukkan bahwa hotel bersertifikat hijau di Indonesia memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang. Menyebarkan bukti-bukti empiris semacam ini kepada pelaku industri merupakan strategi edukasi yang efektif untuk mengubah persepsi bahwa keberlanjutan hanya membebani biaya menjadi pemahaman bahwa keberlanjutan adalah investasi yang menghasilkan imbal hasil yang terukur. Rangkuti (2023) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan peningkatan loyalitas pelanggan yang signifikan pada hotel-hotel yang menerapkan strategi hijau yang terstandarisasi.

Keempat, penerapan pendekatan bertahap (*phased approach*): transisi dari CHSE ke sertifikasi global tidak harus dilakukan secara revolusioner. Pendekatan yang realistis adalah membangun di atas fondasi CHSE dengan secara bertahap meningkatkan standar, dimulai dari aspek-aspek yang paling mudah diimplementasikan dan memberikan penghematan biaya yang segera terasa, kemudian secara progresif bergerak menuju aspek yang lebih kompleks dan transformasional. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk belajar dan beradaptasi tanpa terbebani oleh perubahan yang terlalu masif sekaligus (Wijaya, 2022).

## 5. Kesimpulan

### 5.1 Simpulan

Analisis terhadap sertifikasi CHSE dan posisinya dalam konteks sertifikasi hijau global menunjukkan bahwa program ini merupakan langkah strategis yang vital bagi industri pariwisata Indonesia—namun bukan merupakan titik akhir dari perjalanan menuju keberlanjutan. Sebagai fondasi awal, CHSE telah berhasil membangun kembali kepercayaan konsumen pascapandemi dan menanamkan kesadaran dasar tentang pentingnya praktik ramah

lingkungan dalam operasional bisnis pariwisata (Jurnal Unived, 2025; Putro, 2024; Salsabila, 2023).

Namun, keterbatasan CHSE dalam mencakup aspek-aspek keberlanjutan yang lebih holistik—termasuk manajemen rantai pasok hijau, pengukuran jejak karbon yang komprehensif, dan keterlibatan komunitas yang bermakna—menciptakan kesenjangan yang signifikan antara standar nasional dan tuntutan pasar pariwisata global (Andini, 2024; Yu et al., 2020). Untuk mengisi kesenjangan ini dan meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi pariwisata bertanggung jawab di tingkat internasional, transisi menuju sertifikasi hijau global seperti *Green Key* atau *Green Globe* merupakan investasi strategis yang tidak dapat ditunda lebih lama (Wijaya, 2022; Rangkuti, 2023; Lestari & Purnomo, 2023).

Keberhasilan transisi ini bergantung pada kolaborasi yang sinergis antara pemerintah—yang menyediakan kebijakan insentif dan regulasi yang mendukung—asosiasi industri yang memfasilitasi berbagi pengetahuan dan pembangunan kapasitas, serta pelaku pariwisata yang memiliki komitmen manajemen yang kuat dan visi jangka panjang tentang keberlanjutan (Haldorai et al., 2022; Yusoff et al., 2020). Dengan menggabungkan fondasi yang telah dibangun oleh CHSE dengan ambisi dan standar sertifikasi hijau global, Indonesia memiliki potensi nyata untuk memosisikan dirinya sebagai pemimpin regional—bahkan global—dalam pariwisata yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berdaya saing tinggi.

## 5.2 Keterbatasan dan Penelitian Ke Depan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan literatur yang relatif terbatas dan tidak mencakup data primer dari pelaku industri secara langsung. Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan survei kuantitatif terhadap hotel dan operator wisata bersertifikat CHSE dengan studi kasus kualitatif pada entitas yang telah berhasil melakukan transisi ke sertifikasi hijau global. Perbandingan langsung antara kinerja lingkungan dan keuangan hotel bersertifikat CHSE dengan hotel bersertifikat *Green Key* atau *Green Globe* di Indonesia akan memberikan bukti empiris yang lebih kuat untuk mendukung kebijakan transisi. Kajian tentang dampak sertifikasi hijau terhadap pemberdayaan komunitas lokal dan pelestarian budaya juga merupakan area yang sangat relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks pariwisata berkelanjutan Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Andini, R. (2024). Sustainable tourism implementation in Indonesia: Emphasizing green tourism, community-based tourism, and local empowerment. *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, 11(1), 58–67.
- Haldorai, K., Kim, W. G., & Garcia, R. L. F. (2022). Top management green commitment and green intellectual capital as enablers of hotel environmental performance: The mediating role of green human resource management. *Tourism Management*, 88, 104431.
- Jurnal Unived. (2025). Evaluasi program sertifikasi CHSE desa wisata dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Unived*, 12(1).

Lestari, A., & Purnomo, J. (2023). Financial performance of green certified hotels: A study of Indonesian hotel industry. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 15(2), 88–102.

Putro, H. K. (2024). Post-pandemic economic recovery strategies: A case study on the tourism industry in Indonesia. *Ukanus: Indonesian Journal of Economics and Business*, 1(1), 1–10.

Rangkuti, F. (2023). Analysis of green hotel strategy and its impact on customer loyalty and repurchase intention. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 11(2), 145–160.

Salsabila, A. A. (2023). Implementasi standar kebersihan berbasis CHSE di Hotel Horison Rahaya Resort sebagai penyedia akomodasi wisata. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 1(2), 96–116.

Wijaya, A. (2022). The role of sustainable tourism certification in enhancing destination competitiveness. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 7(1), 45–58.

Yu, Y., Zhang, M., & Huo, B. (2020). The impact of relational capital on green supply chain management and financial performance. *Production Planning & Control*, 31(14), 1145–1157.

Yusoff, Y. M., Nejati, M., Kee, D. M. H., & Amran, A. (2020). Linking green human resource management practices to environmental performance in hotel industry. *Global Business Review*, 21(3), 663–680.